



MEREKONSTRUKSI PARADIGMA POLITIK PEMUDA GMIM DALAM BINGKAI TEOLOGI POLITIK.

Prayer Waraney Lorend Mamangkey¹

Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

mamangkeypreyer@gmail.com

Hendry C.M. Runtuwene²

Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

hendrymc17@gmail.com@gmail.com

Correspondence:

mamangkeypreyer@gmail.com

Article History:

Submitted: 11 Januari 2026

Reviewed: 5 Februari 2026

Accepted: 31 Maret 2026

Keywords: lections,
politics, youth, ethics

Pemilu, politik etika

Copyright:

©2025, Authors.

License:



Abstract

This study explores the relationship and implementation of political theology in shaping the transformative participation of GMIM (Minahasa Evangelical Christian Church) youth in Manado, North Sulawesi. Political theology, as a discipline that studies the intersection between Christian faith and the public sphere, offers a critical framework for understanding how theological beliefs influence views and actions toward justice, power, and community governance. The main focus of this study is to examine how GMIM youth, as vital agents in the context of the Minahasa church and society, can internalize the principles of political theology. We will analyze how concepts such as divine justice, the prophetic calling of the church, and Christian social responsibility can encourage them to engage actively and constructively in responding to crucial GMIM issues.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi relasi dan implementasi teologi politik dalam membentuk partisipasi transformatif pemuda GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) Teologi politik, sebagai disiplin yang mengkaji persimpangan antara iman Kristen dan ranah publik, menawarkan kerangka kritis untuk memahami bagaimana keyakinan teologis memengaruhi pandangan dan tindakan terhadap keadilan, kekuasaan, dan tata kelola masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana pemuda GMIM, sebagai agen vital dalam konteks gereja dan masyarakat Minahasa, dapat menginternalisasi prinsip-prinsip teologi politik. Kami akan menganalisis bagaimana konsep-konsep seperti keadilan ilahi, panggilan kenabian gereja, dan tanggung jawab sosial Kristen dapat mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dan konstruktif dalam merespons isu-isu krusial GMIM

A. Pendahuluan

Dalam mendefinisikan mengenai politik Oscar Cullman, yang dikutip oleh Gunche Lugo, membedakan antara politeia dan politeuma. Politeia berarti politik dalam arti merebut

kekuasaan atau kedudukan dalam pemerintahan. Sedangkan politeuma adalah politik yang menekankan tegaknya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini misalnya: keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan mewujudkan peradaban baru yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26-28).¹ Istilah "politik" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis*,² yang berarti negara-kota. Pada masa Yunani kuno, masyarakat yang tinggal di negara-kota saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan hidup yang oleh Aristoteles disebut sebagai kebaikan tertinggi dalam kehidupan manusia..³ Ketika seseorang berusaha menemukan perannya dalam masyarakat, ia biasanya akan mencari cara untuk mencapai kesejahteraan pribadi baik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia maupun dengan memengaruhi orang lain agar sejalan dengan pandangannya. Aktivitas seperti ini sebenarnya merupakan bagian dari politik.⁴ Dalam konteks pemerintahan, politik pada dasarnya adalah cara mengatur masyarakat melalui pengambilan keputusan bersama. Sebagai bagian dari interaksi sosial, politik melibatkan kekuasaan yakni kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendaknya. Politik juga bisa dilihat sebagai seni dan ilmu dalam memperoleh kekuasaan, baik melalui jalur yang sah secara hukum (konstitusional) maupun yang tidak (nonkonstitusional).⁵ Politik menduduki tempat yang paling penting karena bagian yang terkandung dari pemahaman isi dan landasan filsafatnya mempunyai tujuan politik yang memberikan nilai positif. Namun politik bukanlah tujuan dalam dirinya, tetapi sebagai sarana untuk memperoleh tujuan terakhir bagi manusia yaitu kebahagiaan.⁶

Politik, idealnya adalah untuk menata kehidupan masyarakat sebagai warga negara dalam mencapai tujuan bernegara, jaminan terhadap pelayanan publik, perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara,⁷ akan tetapi kemudian menjadi sangat birokratis, dimana terampasnya hak-hak dasar hidup rakyat dan legislasi tindakan kekerasan. Sehingga orang-orangpun kemudian mengidentifikasi politik sebagai kerja kotor untuk keuntungan dan kenikmatan diri dan kelompok sendiri. Padahal, politik seperti itu adalah sebuah bentuk penyimpangan terhadap proses melanjutkan kehidupan bersama

¹ Gunche Lugo, *Manifesto Politik Yesus* (Penerbit Andi, 2009), 42.

² Lorenz Bagus, *Kamus Filsafat* (Pustaka Utama Gramedia, 1996), 62.

³ K. Bertens, *Etika* (Gramedia Pustaka Utama, 2017), 153.

⁴ GMIM, *Gereja yang Menyembuhkan. Program P.W.G. Terpadu, GMIM*. (BPMS GMIM, 2020), 12.

⁵ Adolf Bastian Simamora, "POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, 1, vol. 1 (2019): 23.

⁶ Edi Sumanto, "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)," *EL-AFKAR Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 2, vol. 1 (2017): 55.

⁷ Denni H. R. Pinontoan, *Gereja yang Berpijak dan Berpihak* (Lintang Rasi Aksara Books, 2013), 121.

dalam sebuah negara. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menerapkan sistem pemilu langsung untuk memilih pemimpin di tingkat nasional dan daerah.⁸ Demokrasi Indonesia ditopang juga dengan prinsip multipartai yang menciptakan begitu banyak partai politik untuk bersaing maupun saling menopang satu dengan yang lain.⁹ Politik merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dapat menentukan arah kebijakan dan tata kelola yang mempengaruhi kehidupan bersama. Melalui politik kita dapat memahami dinamika kekuasaan, serta peran nilai-nilai demokrasi dalam menciptakan tatanan yang adil dan sejahtera. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Demokrasi berarti "pemerintahan rakyat" atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi didalam suatu negara. Hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat.¹⁰

Sudah sejak lama politik ini telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, terutama dalam menentukan pemimpin. Politik mencakup berbagai aktivitas seperti pemerintahan, pemilu, kebijakan politik, hingga advokasi kepentingan masyarakat. Pada dasarnya politik jika dijalankan dengan sehat akan mendatangkan keuntungan bagi kesejahteraan bersama, tetapi sebaliknya juga merusak ideology Negara jika politik dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan. Terdapat berbagai macam kekeliruan pelaksanaan dari politik yang umum terjadi di Indonesia seperti korupsi, persaingan yang tidak sehat dalam pemilu (pemilihan umum), penggelapan dana, mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum, dan lain sebagainya.¹¹

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik juga sering dikaitkan dengan hal penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang menyelenggarakannya bukan rakyat, tetapi pemerintahan yang berkuasa. Hanya saja partisipasi rakyat sangat diharapkan. Tujuannya agar kerja pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Percuma suatu pemerintahan menyelenggarakan Negara tanpa dukungan dari rakyat.¹² Sehingga tujuan dari berpolitik adalah kebahagiaan. Sejatinnya politik Kristen dipahami dengan maknanya yang luas, maka ia adalah horison kehadiran Kekristenan di

⁸ Arifianto Yonatan Alex, "Etika Kristen di tengah Dinamika Politik Praktis: Merevitalisasi Nilai-Nilai Agama dalam Praktik Politik Kontemporer." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*, 2023, 56.

⁹ Timotius Sukarman, "Gereja Yang Bertumbuh dan Berkembang" (Andi, 2012), 90.

¹⁰ Rina Meutia Iryana, *Mengenal sistem Pemerintahan di Indonesia yuk* (Multazam Mulia Utama, 2018), 5.

¹¹ Sumanto, "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)," *EL-AFKAR Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 44.

¹² Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum* (rajawali pers, 2021), 1.

mana peran dirinya dapat mendorong transformasi seluruh kehidupan. Politik dalam arti yang luas tidak hanya sekadar perebutan kekuasaan (power), tetapi juga penegasan arah etis demi pemberdayaan (empower) kehidupan bersama.¹³

Praktik politik yang dikenal di Indonesia pada proses pemilihan umum sehingga istilah tersebut sering disebut sebagai proses pertukaran uang dengan suara atau suatu tindakan jual beli suara untuk mempengaruhi suara pemilih. Di kota Bitung yang adalah tempat tinggal saya, maraknya terjadi praktek politik, bahkan hal ini sudah menjadi kebiasaan atau dapat dikatakan sebagai tradisi yang tercipta dalam lingkungan masyarakat setiap diadakan pemilihan umum. Kebiasaan berpolitik oleh warga masyarakat kota Bitung dan sekitarnya lazim disebut dengan praktik politik. Mengutip dari laman internet, arti dari politik sendiri dapat diartikan sebagai pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di tahun politik atau saat kampanye menjelang Pemilu.¹⁴

Teologi Politik Pemuda GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) adalah refleksi teologis yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab pemuda gereja dalam kehidupan sosial-politik, berdasarkan iman Kristen yang kontekstual di wilayah pelayanan GMIM, khususnya di Sulawesi Utara. Dasar Teologi politik Pemuda GMIM berakar pada pemahaman bahwa iman Kristen tidak hanya bersifat privat atau spiritual, tetapi juga memiliki dimensi publik dan sosial. Beberapa dasar biblikal yang digunakan antara lain Mikha 6:8 – "Melakukan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Yeremia 29:7 – "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang..." Matius 5:13-16 – Garam dan terang dunia: panggilan untuk berdampak dalam masyarakat. Roma 13:1-7 – Relasi antara umat percaya dan otoritas pemerintahan.¹⁵ Teologi politik bagi pemuda GMIM menekankan bahwa Pemuda adalah bagian dari gereja dan bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kebenaran.¹⁶

Keterlibatan dalam dunia politik seharusnya tidak hanya dipandang sebagai ajang perebutan kekuasaan, melainkan sebagai bentuk pelayanan untuk kepentingan bersama. Politik idealnya dijalankan dengan integritas, menjunjung tinggi etika Kristen, dan dilandasi semangat pengabdian. Gagasan politik sebagai pelayanan menekankan bahwa politik adalah cara mengelola kehidupan bersama yang mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah. Kaum muda yang terjun ke dunia politik dipanggil untuk menjadi pemimpin yang melayani,

¹³ Sinaga, *"Umat Kristiani Dan Politik Praktis Di Indonesia: Dari Politik Minoritas Ke Politik Pluralisme,"* 1, vol. 1 (2019): 129.

¹⁴ (2014), <https://aclc.kpk.go.id/hajarseranganfajar>, *Hajar Serangan Fajar*, diakses tanggal 8 Desember.

¹⁵ *"Umat Kristiani Dan Politik Praktis Di Indonesia: Dari Politik Minoritas Ke Politik Pluralisme,"* 12.

¹⁶ F. Ukur, *Gereja dan pemuda* (Gunung Sahari, 1959), 99.

bukan pemimpin yang minta dilayani. Dalam perspektif teologi politik yang bersifat profetik, politik juga menjadi sarana untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan menolak segala bentuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, serta kekerasan dalam praktik politik.

Mendorong pemuda untuk bersikap kritis dan berani menyuarakan suara kenabian terhadap kebijakan atau praktik pemerintahan yang tidak adil. Tidak hanya para orang tua, anak-anak mereka yang juga sudah memiliki hak pilih bahkan memiliki pemikiran serupa dengan orangtua mereka. Para anggota pemuda yang ada di jemaat GMIM juga ada yang memiliki kebiasaan serupa. Selain merusak persekutuan dan persaudaraan dalam jemaat, politik juga berdampak buruk terhadap kondisi di luar jemaat. Paling umum suami dengan istri punya kandidat masing-masing, demikian pula dengan anak-anak yang sudah punya hak memilih bisa terjadi jarak antara sesama karena perbedaan pendapat. Para pemuda yang juga terlibat dalam pembagian uang politik atau dikenal sebagai para tim sukses (timses), tanpa disadari bahwa mereka telah mengarah pada perjalanan menuju pelanggaran, melanggar aturan hukum karena sudah termasuk dalam perbuatan suap menyuap.¹⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dalam konteks alaminya.¹⁸ Pendekatan ini menekankan pada makna, pengalaman, serta perspektif subjek penelitian melalui teknik seperti observasi dan wawancara mendalam.¹⁹ Tidak seperti pendekatan kuantitatif yang berbasis angka, pendekatan kualitatif lebih menekankan deskripsi kontekstual dan naratif.²⁰ Peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Fleksibilitas metode ini memungkinkan penyesuaian teknik sesuai dinamika di lapangan. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menggali realitas sosial yang kompleks, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang terkandung di balik tindakan manusia dalam konteks tertentu. penelitian ini juga akan mengulas bagaimana pendekatan Rekonstruksi paradigma politik di kalangan pemuda gereja dalam Bingkai Teologi Politik.

¹⁷ B Mardjono R eksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI. (Pustaka Populer, 2009), 21.

¹⁸ Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: Umi Aksara, 2013), 89.

¹⁹ Fadhallah, *Wawancara* (UNJ PRESS, 2021), 12.

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Yudhistira, 1985), 67.

C. Pembahasan

ETIKA POLITIK MENURUT JOHN RAWLS

John Rawls (1921-2002) adalah seorang filsuf politik liberal yang sangat berpengaruh, dan penting untuk dicatat bahwa ia bukanlah seorang teolog dalam pengertian tradisional. Ia mengembangkan teori keadilan yang sekuler dan independen dari doktrin komprehensif, termasuk agama. Namun, pemikirannya memiliki implikasi besar bagi teologi politik karena ia berupaya menjawab pertanyaan fundamental tentang bagaimana masyarakat yang adil dan stabil dapat terbentuk di tengah keberagaman keyakinan, termasuk agama.²¹

Meskipun Rawls di kemudian hari menjadi seorang filsuf sekuler, latar belakang teologisnya di masa muda sangat memengaruhi arah pemikirannya. Ia pernah mempertimbangkan untuk menjadi pendeta dan menulis tesis tentang "Dosa dan Iman." Pengalaman Perang Dunia II dan kekejaman yang disaksikannya, seperti Holocaust, membuatnya kehilangan keyakinan pada teisme tradisional. Namun, hal ini justru memperkuat fokusnya pada keadilan, toleransi, dan pencarian dasar rasional untuk hidup bersama dalam damai. Ia melihat sejarah konflik agama sebagai bukti kuat perlunya kerangka politik yang tidak memihak satu pandangan komprehensif pun. Fakta Pluralisme yang Wajar (*The Fact of Reasonable Pluralism*) Rawls mengakui bahwa dalam masyarakat demokratis yang bebas, akan selalu ada berbagai doktrin komprehensif (pandangan dunia, termasuk agama, filosofi, dan moral) yang berbeda dan bahkan bertentangan. Ini bukan karena ketidakrasionalan, tetapi karena hasil alami dari akal budi manusia yang bebas.

Teologi politik, menurut Rawls, harus menerima pluralisme ini sebagai kenyataan permanen, bukan sebagai masalah yang harus dihilangkan. Ini adalah inti dari "teologi politik" Rawls. Nalar publik adalah kerangka berpikir dan berargumen yang harus digunakan oleh warga negara dan pejabat publik ketika membahas isu-isu konstitusional mendasar dan keadilan dasar. Argumen dalam nalar publik harus didasarkan pada alasan yang dapat dipahami dan diterima secara wajar oleh semua warga negara yang bebas dan setara, terlepas dari doktrin komprehensif pribadi mereka. Ini berarti bahwa argumen yang murni didasarkan pada wahyu ilahi, otoritas kitab suci, atau doktrin teologis eksklusif tidak cukup dalam ruang publik. Warga negara beragama didorong untuk mencari alasan publik tambahan (*proviso*) yang dapat dipahami oleh non-penganut agama, atau setidaknya mempresentasikan keyakinan mereka dengan cara yang dapat diakses oleh nalar umum.

²¹ John Rawls, *Political Liberalism* (Columbia University Press, 1993), 3–1.

Rawls tidak melarang ekspresi agama di ruang publik, tetapi menuntut adanya justifikasi yang bersifat publik untuk keputusan politik yang mengikat semua.²²

Konsensus Tumpang Tindih (Overlapping Consensus) Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan politik yang ia usulkan (misalnya, kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan) dapat didukung oleh berbagai doktrin komprehensif yang berbeda, meskipun untuk alasan yang berbeda-beda.²³ Implikasi untuk Agama Sebuah agama mungkin mendukung kebebasan beragama karena diyakini sebagai perintah Tuhan, sementara pandangan sekuler mendukungnya karena alasan hak asasi manusia universal. Konsensus ini memungkinkan stabilitas sosial karena prinsip-prinsip politik tidak bergantung pada satu doktrin komprehensif tunggal, melainkan didukung dari dalam berbagai perspektif yang ada.

Keadilan sebagai Kewajaran (Justice as Fairness) Prinsip-prinsip keadilan Rawls, yang dipilih dalam "posisi asali" di balik "selubung ketidaktahuan," mengedepankan kebebasan dasar yang setara untuk semua dan mensyaratkan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan). Implikasi untuk Agama: Meskipun sekuler, prinsip-prinsip ini seringkali sejalan dengan nilai-nilai etika yang kuat dalam banyak tradisi agama, seperti perhatian terhadap kaum miskin dan tertindas, serta penekanan pada martabat setiap individu. Hal ini dapat menjadi titik temu bagi warga negara beragama untuk mendukung kerangka politik Rawls dari perspektif iman mereka sendiri. Inti dari pendekatan Rawlsian terhadap "teologi politik" adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat demokratis yang plural untuk mencapai stabilitas dan keadilan tanpa memaksakan satu doktrin komprehensif pun. Tujuannya adalah Toleransi Beragama: Memastikan bahwa tidak ada satu agama pun yang mendominasi atau menindas yang lain melalui kekuasaan politik.

Melindungi hak setiap individu untuk mempraktikkan keyakinannya (atau tidak sama sekali) tanpa paksaan. Stabilitas Sosial: Menyediakan dasar bagi masyarakat yang beragam untuk hidup berdampingan secara damai dan adil, meskipun terdapat perbedaan mendalam dalam pandangan hidup. Singkatnya, "teologi politik" menurut John Rawls bukanlah ajaran agama, melainkan sebuah filosofi politik liberal yang berupaya merumuskan cara agar individu dengan keyakinan agama yang berbeda dapat hidup bersama secara adil dan

²² John Rawls, *A Theory of Justice*, ed. rev. (Harvard University Press, 1999), 334.

²³ John Wesley, "The Use of Money," dalam *The Works of John Wesley*, ed. Thomas Jackson (Wesleyan Conference Office, 1872), 123.

damai dalam masyarakat demokratis, melalui penggunaan nalar publik dan dukungan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara luas. Jadi, teologi politik menurut John Rawls memberikan pemuda GMIM sebuah peta jalan untuk berpartisipasi secara konstruktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang plural. Ini bukan tentang mengubah keyakinan mereka, tetapi tentang bagaimana mereka dapat menghidupi iman mereka di ruang publik dengan cara yang adil, toleran, dan dapat berkolaborasi dengan sesama warga negara yang memiliki pandangan berbeda, demi terwujudnya kebaikan bersama di Manado dan Indonesia. Ini adalah cara bagi pemuda GMIM untuk menjadi warga negara yang saleh dan efektif sekaligus.

POLITIK MENURUT PEMUDA GMIM

Berdasarkan wawancara kepada pemuda GMIM khususnya peneliti mewawancarai pandangan mereka seputar politik dan peneliti mendapai hasil bahwa yang mereka pahami lebih merujuk ke politik identitas. Politik identitas sejatinya adalah sebuah strategi dalam perpolitikan untuk mendapatkan suara terbanyak dengan menggunakan persamaan-persamaan yang ada, baik itu persamaan suku, budaya, agama, marga, bahasa, golongan dan lain sebagainya. Dalam hal politik identitas menjadi berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, sering sekali politik identitas menjadikan masyarakat dipecah-belah menurut perbedaan latar belakang hidup sosial, agama, kebudayaan. Hal ini menyebabkan terjadinya sebuah status, antara masyarakat yang berstatus lebih tinggi dan juga masyarakat yang berstatus lebih rendah.²⁴ Kelas-kelas dan sekat-sekat sosial terbentuk dalam suatu sistem sosial. Perbedaan status sosial menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya memperkuat semangat diskriminatif sosial yang membabi buta. Hal ini terjadi dikarenakan manusia menganggap dirinya lebih tinggi daripada sesamanya, merasa lebih berhak daripada yang lain, sehingga terjadi proses perendahan harkat dan martabat sesama, yang sebenarnya secara hakikatnya sama. Dalam praktiknya, politik sangat dekat dengan kekuasaan. Memang secara teoritik normatif, pengertian politik adalah teknik atau strategi untuk mengelola kekuasaan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Saut Hamonangan Sirait menyimpulkan bahwa, "politik adalah untuk perwujudan kedaulatan rakyat melalui pembuatan keputusan yang dilakukan rakyat bagi kehidupan pencapaian cita-cita bersama.

Menurutmu, apa itu politik dalam kehidupan sehari-hari? kalau menurut saya, politik itu tentang cara kita mengatur hidup bersama. Gak cuma soal pemerintah atau DPR saja,

²⁴ Wawancara AS, TS, TT 20 Juni 2025

tapi juga bagaimana keputusan di lingkungan kita dibuat, siapa yang punya kuasa, dan bagaimana sumber daya dibagi. Misalnya, di lingkungan gereja pun kan ada "politik" internalnya, bagaimana keputusan bersama diambil.²⁵

Peneliti mendapati jawaban dari para pemuda dimana Politik bagi pemuda GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) dapat dilihat dari berbagai lensa, menggabungkan identitas keagamaan mereka dengan peran mereka sebagai warga negara. Mengingat GMIM adalah salah gereja Protestan terbesar di Indonesia dengan akar yang kuat di Sulawesi Utara, pemahaman politik di kalangan pemudanya seringkali mencerminkan nilai-nilai Injili, konteks sosial-budaya Minahasa, dan tantangan modern. Bagi banyak pemuda GMIM, politik tidak hanya terbatas pada pemilihan umum (Pilkada, Pileg, Pilpres) atau perebutan kekuasaan.²⁶ Ada pemahaman yang lebih luas bahwa politik adalah tentang pengelolaan kehidupan bersama untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian, yang berakar pada nilai-nilai Injil. Ini mencakup: Panggilan untuk Keadilan Sosial: Terinspirasi dari ajaran Yesus tentang mengasihi sesama dan memperhatikan kaum yang lemah, pemuda GMIM memahami politik sebagai arena untuk memperjuangkan keadilan. Ini berarti peka terhadap isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, lingkungan hidup, dan korupsi. Mereka percaya bahwa iman harus mendorong mereka untuk tidak tinggal diam melihat ketidakadilan.

Melayani Sesama (Diakonia): Pelayanan (diakonia) adalah inti GMIM. Bagi pemuda, ini meluas dari kegiatan gerejawi tradisional ke bentuk pelayanan yang memiliki dimensi politik. Misalnya, inisiatif bantuan bencana, program pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, atau advokasi untuk kelompok rentan dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi politik yang konstruktif, karena semua ini berkontribusi pada kesejahteraan umum. Integritas dan Etika Kepemimpinan: Pemuda GMIM seringkali menekankan pentingnya integritas dan etika dalam kepemimpinan, baik di gereja maupun di pemerintahan. Mereka cenderung mengharapkan pemimpin yang jujur, transparan, dan berkomitmen pada kebenaran, sejalan dengan ajaran moral Kristen.

Pemuda GMIM umumnya didorong untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Ini bisa termanifestasi dalam beberapa cara Partisipasi dalam Pemilu: Kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai pemilih adalah hal yang penting.

²⁵ Wawancara AS, TS, TT 20 Juni 2025

²⁶ Wawancara AS, TS, TT 20 Juni 2025

²⁷Mereka didorong untuk menggunakan hak suara mereka secara bijak, bukan berdasarkan fanatisme, tetapi berdasarkan rekam jejak, visi, dan nilai-nilai calon yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Keterlibatan dalam Organisasi Kepemudaan: Banyak pemuda GMIM aktif dalam Komisi Pelayanan Pemuda Sinode GMIM (KPPS GMIM) atau tingkat jemaat dan wilayah. Organisasi-organisasi ini tidak hanya fokus pada kegiatan rohani, tetapi juga seringkali mengadakan program-program yang menumbuhkan kesadaran sosial dan keterampilan kepemimpinan yang relevan untuk berpartisipasi di ruang publik.

Suara Kenabian: Terkadang, pemuda GMIM mengambil peran kenabian, menyuarakan kritik terhadap kebijakan atau praktik yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai Injili. Ini bisa dilakukan melalui diskusi, tulisan, atau aksi damai. Mereka percaya bahwa gereja, termasuk pemudanya, memiliki mandat moral untuk berbicara kebenaran kepada kekuasaan. Membangun Komunitas Inklusif: Di Minahasa, yang dikenal dengan keragaman latar belakang, pemuda GMIM juga peduli pada politik identitas dan pentingnya menjaga harmoni antar-umat beragama. Mereka berusaha mempromosikan toleransi dan kerja sama lintas batas demi kebaikan bersama. Meski demikian, pemuda GMIM juga menghadapi tantangan dalam berpolitik. Apatisme Politik: Fenomena apatisme politik global juga bisa memengaruhi pemuda GMIM, membuat mereka merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membuat perubahan signifikan.

Polarisasi Politik: Lingkungan politik yang semakin terpolarisasi dapat membuat pemuda sulit untuk terlibat secara konstruktif tanpa terjebak dalam perpecahan. Pemahaman Dangkal: Terkadang, pemahaman politik bisa terbatas pada slogan atau figur populer, tanpa analisis mendalam terhadap isu dan kebijakan. Namun, harapan tetap besar. Dengan pembinaan yang tepat dari gereja dan dorongan untuk berpikir kritis, pemuda GMIM memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang signifikan di Sulawesi Utara dan Indonesia. Mereka dapat menjadi contoh bagaimana iman dapat menginspirasi partisipasi politik yang berintegritas, berorientasi pada pelayanan, dan berkomitmen pada keadilan. Secara keseluruhan, politik bagi pemuda GMIM adalah perpanjangan dari iman dan pelayanan mereka, sebuah panggilan untuk berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan damai, sesuai dengan kehendak Allah

Politik Kristen yang sering memanfaatkan simbol dan jaringan umat sebagai kendaraan untuk merebut kekuasaan. Gereja seharusnya menjalankan peran kenabian agar

²⁷ Wawancara AS, TS, TT 20 Juni 2025

bersama-sama dengan kelompok lain memperjuangkan keadilan sosial. Gereja hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan dalam rangka panggilan dan pengutusan untuk menjadi berkat maka ia memiliki tanggung jawab politik yang dipahami sebagai praksis teologis untuk semua orang. Dalam konteks Indonesia, semua orang adalah setiap warga negara yang padanya melekat identitas agama dan etnis. Dasar pemahaman inilah yang melandasi gereja untuk merespon menguatnya politik identitas yang berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan kelompok sendiri. Politik identitas ini seperti yang muncul dalam fenomena politik praktis bermasalah bagi ideal dan usaha pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁸ Ruang publik Indonesia adalah 'medan kesaksian' gereja untuk keadilan demi shalom. Gereja dalam teologi politiknya menyatakan kesaksian Injil dalam solidaritas untuk orang-orang yang menderita; untuk mereka yang didiskriminasi dan lebih luas untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dalam situasi yang tidak menentu atau tidak damai.²⁹ Gereja sebagai tubuh Kristus perlu berhati-hati terhadap bahaya politik identitas, yang dapat saja terjadi ketika pertimbangan suku, suka/tidak suka, kelompok, dan keluarga memengaruhi strategi pelayanan di Gereja. Strategi berbasis politik identitas dapat berpengaruh buruk pada persekutuan jemaat dan bahkan persekutuan para pelayan gereja (pendeta, penatua, diaken, dan pengajar). Dalam pelayanan gerejawi dan kecenderungan nepotisme menjadi gejala yang kuat terasa. Di dalam Perjanjian Baru tidak menganggap bahwa negara harus menandingi Allah. Warga negara Kristen wajib setia kepada pemerintah (Roma 13:1 dst), dan harus berdoa untuk seluruh pejabatnya (1 Tim 2:2), "agar dapat hidup dalam tenang dan tenteram".¹⁸ Pelajaran pentingnya adalah bahwa kekristenan jangan alergi terhadap politik. Beberapa alasan adalah politik dari segi normative merupakan hal yang mulia. Dalam pengertian bahwa keadilan dan kebenaran menjadi tujuan politik harus mendapat tempat dihati orang Kristen untuk diperjuangkan tanpa mengenal lelah. Kemudian keterlibatan dalam dunia politik telah diawali dengan sebuah panggilan perjuangan atas ketimpangan atau persoalan sosial sebagai motivasi dan dunia politik merupakan sarana mencapai tujuan itu. Orang Kristen bahkan pelayan khusus dapat mengambil bagian dalam dunia politik sebagai keterpanggilannya atas dunia dan menebarkan terang di dalam Kristus sebagai patokan etis dalam menangani masalah dunia, asalkan ia tetap dalam memperjuangkan hak normatif sebagai motivasi murninya dan meninggalkan politik praktis yang berpusat kepada kekuasaan dengan menggunakan segala

²⁸ Wawancara AS, TS, TT 20 Juni 2025

²⁹ *Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama | Request PDF," ResearchGate, 22 Oktober 2024, 23, <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2.>, 2024, 70.*

cara untuk mencapai tujuan.³⁰

Etika Politik Dengan Pandangan pemuda Mengenai Politik.

Korelasi antara Politik Menurut John Rawls dengan Politik Pemuda GMIM

Ada korelasi yang signifikan dan saling memperkaya antara pemikiran politik John Rawls dan cara pemuda GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) memahami serta berpartisipasi dalam politik. Meskipun Rawls adalah seorang filsuf sekuler dan bukan teolog, prinsip-prinsip liberalismenya menawarkan kerangka kerja yang kuat bagi pemuda GMIM untuk menavigasi realitas masyarakat pluralis di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, sambil tetap setia pada keyakinan Injili mereka. Menerima Pluralisme sebagai Realitas, Bukan Ancaman Rawls menekankan "fakta pluralisme yang wajar", yaitu kenyataan bahwa dalam masyarakat demokratis yang bebas, beragam pandangan dunia (termasuk agama, filsafat, dan moral) akan selalu ada. Bagi pemuda GMIM, ini berarti mengakui bahwa Indonesia, dan Manado khususnya, adalah rumah bagi berbagai agama (Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dll.) dan keyakinan.

Korelasi: Pemuda GMIM dapat mengadopsi pandangan ini untuk menolak eksklusivisme atau dominasi agama. Alih-alih melihat perbedaan sebagai ancaman, mereka bisa memandangnya sebagai tantangan untuk hidup berdampingan secara damai. Ini sejalan dengan ajaran kasih dan toleransi dalam Injil, serta semangat kebersamaan yang kuat dalam budaya Minahasa. Mereka belajar bahwa keadilan bagi semua tidak berarti semua harus sama, tetapi semua harus memiliki hak dan kesempatan yang setara. Konsep "nalar publik" Rawls adalah tentang bagaimana warga negara harus berargumen dalam isu-isu politik fundamental. Argumen harus berdasarkan alasan yang dapat dipahami dan diterima secara wajar oleh semua, terlepas dari keyakinan komprehensif pribadi. Korelasi: Ini sangat relevan bagi pemuda GMIM yang ingin membawa nilai-nilai iman mereka ke ranah politik. Daripada memaksakan argumen yang hanya berdasarkan ayat Alkitab atau doktrin gereja semata, mereka didorong untuk menerjemahkan nilai-nilai Injili ke dalam bahasa kebaikan bersama (common good) yang bisa dimengerti oleh non-Kristen.

Contoh: Ketika pemuda GMIM menyuarakan penolakan terhadap korupsi, motivasi internal mereka mungkin berasal dari ajaran Alkitab tentang integritas dan keadilan Tuhan. Namun, dalam diskusi publik, mereka akan menggunakan argumen tentang kerugian ekonomi yang ditimbulkan korupsi bagi rakyat, pelanggaran hak asasi manusia, atau

³⁰ Malcolm Brownlee, *HAI PEMUDA PILIHLAH!*, Menghadapi masalah-masalah etika pemuda (BPK Gunung Mulia, 2011), 12.

kerusakan kepercayaan publik. Argumen-argumen ini bersifat publik dan dapat diterima oleh semua warga negara yang rasional. Ini bukan berarti menyingkirkan iman, melainkan strategi partisipasi yang efektif dalam masyarakat plural, memungkinkan iman menjadi relevan dan berdampak tanpa menjadi dominan atau eksklusif.

Membangun Konsensus Tumpang Tindih untuk Keadilan Sosial Rawls mengusulkan "konsensus tumpang tindih", di mana prinsip-prinsip politik yang adil dapat didukung oleh berbagai doktrin komprehensif dari alasan yang berbeda.

Korelasi: Pemuda GMIM dapat menemukan landasan teologis untuk mendukung prinsip-prinsip keadilan Rawls (misalnya, membela yang lemah atau memperjuangkan kebebasan fundamental) karena selaras dengan ajaran Injil tentang kasih, keadilan, dan martabat manusia. Pada saat yang sama, pemuda dari agama lain atau pandangan sekuler dapat mendukung prinsip-prinsip yang sama dari dasar keyakinan mereka sendiri. Contoh: Pemuda GMIM dapat bergabung dengan pemuda Muslim atau organisasi lingkungan dalam kampanye kebersihan pantai di Manado. Motivasi pemuda GMIM mungkin adalah menjaga ciptaan Tuhan, sementara yang lain termotivasi oleh etika lingkungan universal atau tanggung jawab sipil. Hasilnya adalah aksi bersama untuk kebaikan publik, yang didukung oleh berbagai alasan, menciptakan stabilitas dan efektivitas. Ini mendorong kolaborasi dan solidaritas lintas batas agama dan ideologi demi isu-isu sosial yang konkret.

Membela Kebebasan dan Keadilan untuk Semua Prinsip-prinsip keadilan Rawls, terutama kebebasan dasar yang setara untuk semua dan prinsip perbedaan (memaksimalkan manfaat bagi yang paling tidak beruntung), memiliki resonansi etis yang kuat dengan nilai-nilai Injili. Pemuda GMIM didorong untuk menjadi pembela aktif hak asasi manusia dan keadilan bagi semua, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Mereka dapat menjadi suara bagi yang terpinggirkan, melawan diskriminasi, dan memperjuangkan kebijakan yang adil. Ini adalah perwujudan konkret dari panggilan untuk mengasihi sesama dan menjadi "garam dan terang" dunia dalam konteks politik.³¹

Korelasi antara politik menurut John Rawls dan politik pemuda GMIM terletak pada bagaimana pemikiran Rawls menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan pemuda GMIM untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab, efektif, dan adil dalam masyarakat plural. Dengan memahami pluralisme, menggunakan nalar publik, mencari konsensus tumpang tindih, dan membela prinsip keadilan, pemuda GMIM dapat menjalankan panggilan iman mereka di ranah politik dengan cara yang konstruktif dan transformatif,

³¹ Wawancara AS, TS, TT 20 Juni 2025

berkontribusi pada kebaikan bersama di Manado dan Indonesia.

Politik yang Berkeadilan dalam Masyarakat Plural

Baik John Rawls maupun pemuda GMIM, dari perspektif yang berbeda, pada dasarnya berupaya menjawab pertanyaan fundamental yang sama: bagaimana hidup bersama secara adil dan damai di tengah perbedaan yang mendalam? John Rawls, seorang filsuf politik sekuler, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk demokrasi liberal yang adil. Melalui konsep seperti pluralisme yang wajar, nalar publik, dan konsensus tumpang tindih, Rawls menunjukkan bahwa masyarakat yang dihuni oleh warga negara dengan berbagai pandangan komprehensif (termasuk agama) dapat mencapai stabilitas dan keadilan. Kuncinya adalah menghargai kebebasan setiap individu, termasuk kebebasan beragama, dan membangun prinsip-prinsip politik yang dapat diterima dan dibenarkan secara publik oleh semua warga negara yang bebas dan setara, bukan hanya oleh satu kelompok.

Bagi pemuda GMIM, pendekatan Rawls ini sangat relevan dan dapat menjadi pedoman praktis. Ini mendorong mereka untuk Menerima Keragaman Memandang pluralisme sebagai keniscayaan dan kekuatan, bukan ancaman, sejalan dengan nilai-nilai kasih dan toleransi Injili. Berpartisipasi Secara Rasional dan Etis: Membawa nilai-nilai iman mereka ke ranah publik melalui argumen yang dapat diterima secara luas (nalar publik), bukan hanya doktrin eksklusif, sehingga kontribusi mereka bisa dipahami dan dihargai oleh semua. Berjuang Bersama untuk Keadilan: Berkolaborasi dengan berbagai kelompok dari latar belakang berbeda (konsensus tumpang tindih) untuk mencapai tujuan keadilan sosial yang sama, meskipun motivasi dasarnya berbeda-beda. Menjadi Agen Perubahan: Menjadi pembela aktif kebebasan, kesetaraan, dan martabat bagi semua, terutama bagi mereka yang paling rentan, sebagai perwujudan iman mereka dalam tindakan nyata. Pada akhirnya, korelasi antara pemikiran Rawls dan politik pemuda GMIM menunjukkan bahwa iman dapat menjadi kekuatan pendorong yang kuat untuk partisipasi politik yang konstruktif dan berkeadilan dalam masyarakat yang plural. Ini bukan tentang menguasai politik, melainkan tentang bagaimana individu beriman dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, damai, dan inklusif bagi semua, sesuai dengan cita-cita Injil dan prinsip-prinsip demokrasi modern.

D. Kesimpulan

Bagi pemuda GMIM, teologi politik Rawls menyediakan lensa untuk melihat dan bertindak. Panggilan kenabian gereja bukan hanya khotbah di mimbar, melainkan seruan

untuk terlibat dalam transformasi sosial. Pemuda dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan struktural di GMIM baik itu isu lingkungan, kesenjangan ekonomi, atau diskriminasi dengan memadukan data faktual dengan narasi teologis tentang martabat manusia. Advokasi Berbasis Nilai Dengan memahami hak-hak dasar dan pentingnya kesempatan yang adil, pemuda dapat mengadvokasi kebijakan atau praktik yang lebih inklusif dan adil, baik di lingkungan gereja maupun masyarakat luas. Aksi mereka akan berakar pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Keterlibatan Transformatif: Partisipasi mereka melampaui sekadar kehadiran fisik. Ini adalah tentang menciptakan perubahan nyata melalui program-program diakonia yang memberdayakan, kampanye media sosial yang edukatif, atau dialog antaragama.

Referensi

- Ahmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*. Rajawali pers, 2021.
- Bagus, Lorenz. *Kamus Filsafat*. Pustaka Utama Gramedia, 1996.
- Bertens, K. *Etika*. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Brownlee, Malcolm. *HAI PEMUDA PILIHLAH!, Menghadapi masalah-masalah etika pemuda*. BPK Gunung Mulia, 2011.
- eksodiputro, B Mardjono R. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI. Pustaka Populer, 2009.
- Fadhallah. *Wawancara*. UNJ PRESS, 2021.
- GMIM. *Gereja yang Menyembuhkan. Program P.W.G. Terpadu, GMIM*. BPMS GMIM, 2020.
- Gunawan, Imam. *metode penelitian kualitatif, Teori dan Praktik*. Umi Aksara, 2013.
- Lugo, Gunche. *Manifesto Politik Yesus*. Penerbit Andi, 2009.
- Meutia Iryana, Rina. *Mengenal sistem Pemerintahan di Indonesia yuk*. Multazam Mulia Utama, 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Yudhistira, 1985.
- Pinontoan, Denni H. R. *Gereja yang Berpijak dan Berpihak*. Lintang Rasi Aksara Books, 2013.
- Rawls, John. *A Theory of Justice, ed. rev.* Harvard University Press, 1999.
- Rawls, John. *Political Liberalism* (. Columbia University Press, 1993.
- Simamora, Adolf Bastian. "POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*. 1, vol. 1 (2019).
- Sinaga. "Umat Kristiani Dan Politik Praktis Di Indonesia: Dari Politik Minoritas Ke Politik Pluralisme." 1, vol. 1 (2019).
- Sukarman, Timotius. "Gereja Yang Bertumbuh dan Berkembang." Andi, 2012.
- Sumanto, Edi. "PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK (Studi Komperatif Al-Farabi Dengan Thomas Aquinas)," *EL-AFKAR Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*. 2, vol. 1 (2017).
- Ukur, F. *Gereja dan pemuda*. Gunung Sahari, 1959.
- Wesley, John. "The Use of Money," dalam *The Works of John Wesley, ed. Thomas Jackson*. Wesleyan Conference Office, 1872.
- Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama | Request PDF," *ResearchGate*, 22 Oktober 2024, 23, <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>. 2024.
- Yonatan Alex, Arifianto. "Etika Kristen di tengah Dinamika Politik Praktis: Merevitalisasi Nilai-Nilai Agama dalam Praktik Politik Kontemporer." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*,. 2023.

